

BAB 2

LATAR BELAKANG DAN PROSES PENDIRIAN TAMAN ISMAIL MARZUKI PADA TAHUN 1968

Pada bab ini akan membahas latar belakang serta proses berdirinya TIM pada tahun 1968. Pembahasan difokuskan pada kebutuhan para seniman akan ruang ekspresi di Jakarta, kebijakan Gubernur Ali Sadikin dalam mendukung pembangunan pusat kesenian, serta dukungan dari para seniman terhadap pendirian pusat kesenian tersebut. Melalui uraian ini, dapat dipahami bahwa pendirian TIM merupakan hasil dari kebutuhan bersama dan kebijakan yang saling mendukung pada masa itu. Dalam konteks ini, gagasan ruang publik yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas dapat digunakan untuk melihat TIM sebagai ruang yang memungkinkan terjadinya interaksi, pertukaran gagasan, serta diskusi terbuka di antara seniman dan juga masyarakat. Kehadiran TIM tidak hanya menyediakan tempat pertunjukan, tetapi juga membentuk ruang komunikasi yang memberi kesempatan bagi seniman untuk menyampaikan ekspresi dan pandangan mereka kepada masyarakat luas. Dengan demikian, pendirian TIM dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan ruang publik seni yang mempertemukan kebutuhan sosial para seniman dengan kebijakan pemerintah pada masa tersebut.

2.1 Kebutuhan Ruang Ekspresi Para Seniman di Jakarta

Jika dilihat menggunakan teori ruang publik dari Jürgen Habermas, kondisi kehidupan seni di Jakarta sebelum berdirinya TIM sebenarnya sudah menunjukkan adanya ruang publik bagi para seniman, meskipun masih bersifat sederhana dan informal. Habermas menjelaskan bahwa ruang publik merupakan tempat di mana masyarakat dapat berkumpul, berdiskusi, bertukar gagasan, serta menyampaikan pendapat secara terbuka. Melalui interaksi semacam ini, berbagai ide baru dapat muncul dan berkembang karena adanya proses komunikasi di antara individu yang memiliki kepentingan yang sama.²⁶

²⁶ Habermas, J. (1962), *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, (ed. Bahasa Inggris) MIT Press. Hlm. 2

Kehidupan seni di Jakarta pada masa itu memperlihatkan adanya ruang interaksi seperti yang dimaksud dalam konsep ruang publik. Tempat-tempat berkumpul para seniman, misalnya Planet Senen, menjadi lokasi penting bagi lahirnya diskusi dan pertukaran gagasan. Para penyair, penulis, pelukis, aktor teater, dan musisi sering bertemu di tempat tersebut untuk berdiskusi mengenai karya, membaca puisi, membicarakan rencana pertunjukan, atau sekadar berdiskusi tentang perkembangan seni.²⁷ Pertemuan yang berlangsung secara rutin tersebut menciptakan suasana dialog yang memungkinkan munculnya berbagai gagasan kreatif.

Planet Senen pada masa itu bukan sekedar tempat berkumpul, tetapi juga dapat dipahami sebagai ruang sosial bagi komunitas seniman. Interaksi yang terjadi di sana menunjukkan bahwa kehidupan seni di Jakarta sebenarnya sudah berkembang melalui hubungan antarseniman yang cukup kuat. Diskusi, pertukaran ide, serta berkarya bersama menjadi bagian penting dalam proses pembentukan karya dan perkembangan pemikiran kesenian. Ruang seperti ini berperan dalam membangun jaringan sosial di antara para seniman sekaligus memperkuat komunitas seni yang ada di Jakarta.²⁸

Keterbatasan fasilitas menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh para seniman pada masa itu. Kegiatan seni memang dapat berlangsung melalui ruang-ruang informal, tetapi belum ada tempat yang benar-benar dirancang untuk kegiatan pertunjukan karena tidak tersedianya arena panggung yang memadai, sistem pencahayaan, maupun tata suara yang mendukung pertunjukan secara optimal. Kondisi tersebut membuat para seniman seringkali harus menyesuaikan diri dengan ruang yang tersedia atau berpindah-pindah tempat ketika ingin menampilkan karya mereka.

Keterbatasan ruang tersebut juga memengaruhi hubungan antara seniman dan masyarakat.²⁹ Konsep ruang publik yang dijelaskan oleh Habermas menekankan

²⁷ Remy Sylado. (2004). *Senen: Sebuah Memoar*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Hlm. 30-31

²⁸ Sylado. *Op, cit.* hlm. 64

²⁹ Venny Felicia Hens & Sutarki Sutisna (2022). *Ruang Seni Senen sebagai Titik Akupuntur Perkotaan untuk Menghidupkan Identitas Kesenian dan Memori Senen*. Jurnal Stupa: Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, dan Arsitektur, volume 4, nomor 2. Hlm. 2-3.

pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses komunikasi yang terjadi di ruang tersebut. Situasi di Jakarta pada masa itu menunjukkan bahwa kegiatan seni lebih sering dinikmati oleh kalangan yang terbatas, terutama oleh komunitas seniman itu sendiri. Akses masyarakat yang lebih luas terhadap pertunjukan seni masih belum optimal karena tidak adanya tempat yang secara khusus dapat menampung kegiatan kesenian.³⁰

Kebutuhan akan ruang kesenian yang terorganisasi kemudian mulai dirasakan oleh para seniman di Jakarta. Komunitas seni sebenarnya sudah terbentuk dan aktivitas kesenian sudah berjalan cukup aktif. Dukungan fasilitas yang memadai masih menjadi kekurangan yang cukup terasa dalam perkembangan kehidupan seni pada masa tersebut. Keberadaan ruang yang mampu menampung berbagai kegiatan seni secara lebih terstruktur dipandang penting untuk mendukung perkembangan kesenian sekaligus memperluas jangkauan masyarakat terhadap karya seni.

Pendirian TIM pada akhirnya dapat dipahami sebagai upaya untuk menyediakan ruang publik kesenian yang lebih jelas dan terfasilitasi di Jakarta. Kehadiran TIM memberikan tempat yang lebih layak bagi para seniman untuk berlatih, berdiskusi, maupun menampilkan pertunjukan. Fasilitas yang tersedia juga memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses berbagai kegiatan seni yang diselenggarakan di sana.³¹

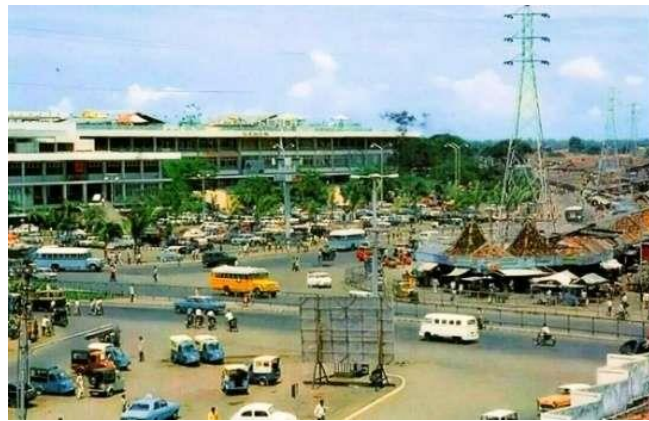
Jika dilihat secara keseluruhan, kebutuhan ruang ekspresi para seniman di Jakarta sebelum berdirinya TIM bukan karena tidak adanya kreativitas, melainkan karena belum adanya wadah yang menopangnya. Komunitas sudah ada, gagasan sudah berkembang, dan kegiatan sudah berjalan. Namun, semuanya masih mengandalkan solidaritas dan inisiatif pribadi, sehingga situasi inilah yang pada akhirnya melahirkan kesadaran bersama bahwa Jakarta memerlukan sebuah pusat kesenian yang tetap, representatif, dan mampu menampung berbagai bentuk ekspresi seni dalam satu kawasan.

Dengan demikian, pendirian TIM dapat dipahami sebagai jawaban atas kebutuhan yang sudah lama dirasakan oleh para seniman. TIM bukan titik awal

³⁰ Misbach Yusa Biran. (2008). *Keajaiban di Pasar Senen*. Jakarta: Gramedia. Hlm. 32

³¹ Biran. *Op, cit*. Hlm. 35-36

lahirnya kehidupan seni di Jakarta, melainkan kelanjutan dari proses yang sudah tumbuh sebelumnya. Kehadirannya memberi ruang yang lebih layak, lebih tertata, dan mampu menopang perkembangan seni dan kebudayaan di Jakarta dalam jangka panjang.



Gambar 2.1 Planet Senen Zaman Dahulu
Sumber: Arsip DKJ

2.2 Kebijakan Gubernur Ali Sadikin

Kebijakan kebudayaan yang dirumuskan oleh Ali Sadikin tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-politik Jakarta pada akhir 1960-an. Ia mulai menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 1966, dalam situasi transisi kekuasaan nasional menuju Orde Baru yang diiringi oleh penataan kembali berbagai sektor kehidupan, termasuk pemerintahan daerah. Jakarta sebagai ibu kota negara menghadapi persoalan yang kompleks seperti jumlah penduduk terus bertambah, keterbatasan infrastruktur, ketimpangan sosial, serta kebutuhan akan penataan wajah kota sebagai representasi nasional. Dalam kerangka inilah Ali Sadikin memandang bahwa pembangunan tidak semata-mata hanya aspek fisik dan ekonomi, akan tetapi kehidupan sosial, seni, dan budaya masyarakat juga perlu diperhatikan agar kota bisa berkembang secara lebih seimbang.³²

Sebagai pemimpin daerah yang berlatar belakang militer, Ali Sadikin dikenal sebagai sosok yang tegas dalam mengambil keputusan. Namun, di balik sikapnya yang keras, ia ternyata memberi perhatian besar pada kehidupan seni dan budaya. Menurutnya, kota besar bukan hanya soal gedung tinggi dan jalan yang lebar melainkan

³² Wahyono. *Loc, cit*

juga harus punya ruang untuk orang-orang mengekspresikan ide dan kreativitasnya. Karena itu, kebijakan di bidang kebudayaan bukan sekadar pelengkap, tetapi menjadi bagian penting dari rencana pembangunan kota Jakarta.

Ali Sadikin sering menekankan bahwa fasilitas umum harus bisa digunakan oleh banyak orang. Ia melihat seni sebagai sarana untuk membangun cara berpikir, memperluas wawasan, dan membuka ruang diskusi di tengah masyarakat. Saat kegiatan seni di Jakarta makin ramai dan berkembang melalui berbagai komunitas, ia merasa pemerintah daerah perlu memberi dukungan yang lebih jelas.³³

Langkah awal yang menunjukkan perhatian Ali Sadikin terhadap sektor seni dan budaya tampak ketika ia meresmikan kembali penggunaan Balai Budaya di Jalan Gereja Theresia pada awal 1968. Tindakan ini dapat dipahami sebagai upaya menghidupkan kembali ruang seni yang sempat mengalami kemerosotan. Namun, kapasitas dan fungsi Balai Budaya masih sangat terbatas, baik dari segi fasilitas teknis maupun daya tampung penonton. Sementara itu, kegiatan seni pada masa tersebut semakin beragam mulai dari teater, sastra, musik, seni rupa, hingga tari. Kondisi inilah yang mendorong para seniman untuk membutuhkan ruang yang lebih memadai agar dapat berkarya dan menampilkan hasil karyanya secara optimal.³⁴

Kebijakan untuk membangun pusat kesenian muncul sebagai jawaban atas kebutuhan yang benar-benar dirasakan oleh para seniman di Jakarta. Ali Sadikin tidak hanya menyetujui rencana tersebut, tetapi juga menyediakan anggaran dan memberikan dukungan penuh agar rencana itu dapat benar-benar terlaksana. Dukungan ini sangat penting, karena pada masa itu tidak semua program kesenian mendapat perhatian utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan memasukkan pembangunan pusat kesenian ke dalam agenda resmi pemerintah, Ali Sadikin menunjukkan bahwa sektor seni juga memiliki posisi yang penting dalam kebijakan daerah.

Kebijakan tersebut juga menunjukkan adanya komunikasi yang cukup terbuka antara pemerintah dengan para seniman. Gagasan tentang pendirian pusat kesenian tidak muncul secara sepihak, melainkan melalui berbagai diskusi yang dilakukan di

³³ Ali Sadikin. (1977). *Catatan H. Ali Sadikin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1966-1977*. Jakarta: Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Hlm. 210-211

³⁴ Institut Kesenian Jakarta (2020). *Bang Ali*. Jurnal Institut Kesenian Jakarta: Pusat Studi & Pengembangan Budaya Betawi. Hlm. 1-2.

beberapa tempat, termasuk kantor Harian Kami dan rumah tokoh-tokoh intelektual. Konsep yang dirumuskan oleh Arifin C. Noor dan kemudian disampaikan melalui Christiano Wibisono menjadi contoh bahwa terdapat kerja sama dan pertukaran gagasan antara kalangan seniman dan pemerintah. Dalam proses ini, Ali Sadikin berperan sebagai pihak yang mengambil keputusan akhir sekaligus memberikan persetujuan terhadap usulan tersebut.³⁵

Pusat kesenian itu kemudian diberi nama Taman Ismail Marzuki (TIM), sebagai bentuk penghormatan kepada komponis Ismail Marzuki. Kehadiran TIM menjadi wujud nyata kebijakan budaya Ali Sadikin yang menempatkan seni sebagai bagian dari pembangunan kota.³⁶ Dengan demikian, pendirian TIM dapat dipahami sebagai hasil dari visi kebijakan Ali Sadikin yang progresif, yang melihat kesenian bukan hanya sekedar aktivitas kreatif, melainkan sebagai elemen penting dalam pembentukan ruang publik dan kehidupan sosial di Jakarta.

Kehadiran pusat kesenian membuat berbagai kelompok masyarakat bisa berinteraksi dalam satu ruang yang sama, mulai dari seniman, intelektual, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Mereka dapat berinteraksi dan berdiskusi secara lebih terbuka. Pertunjukan teater, pameran seni rupa, dan diskusi sastra menjadi sarana untuk bertukar gagasan. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berpengaruh pada perkembangan seni, tetapi juga mendorong tumbuhnya ruang diskusi di ruang publik.

Keberadaan TIM turut memperkuat posisi Jakarta sebagai salah satu pusat perkembangan seni dan budaya di tingkat nasional. Berbagai acara seni, baik berskala nasional maupun internasional, kemudian diselenggarakan di tempat ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Ali Sadikin memiliki dampak terhadap citra kota Jakarta sebagai kota budaya. Fasilitas yang dibangun pada akhir 1960-an menjadi dasar penting bagi pertumbuhan kegiatan seni pada masa-masa berikutnya.³⁷

Kebijakan pembangunan TIM tidak berjalan tanpa hambatan. Keterbatasan anggaran serta situasi politik pada awal era Orde Baru menjadi tantangan tersendiri dalam proses pendiriannya. Meskipun menghadapi berbagai kendala tersebut, keputusan Ali

³⁵ Institut Kesenian Jakarta. *Op, cit.* Hlm. 4

³⁶ Taracakti. *Op, cit.*

³⁷ Umar Kayam. (1981). *Seni, Tradisi, dan Masyarakat*. Jakarta: Sinar Harapan. Hlm. 33

Sadikin untuk tetap mendukung pembangunan pusat kesenian menunjukkan bahwa sektor kesenian tetap memperoleh perhatian dalam rencana pembangunan daerah. Ia memandang seni bukan sekedar hiburan, melainkan sebagai bagian penting dalam membentuk identitas kota dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Secara keseluruhan, kebijakan Gubernur Ali Sadikin di bidang kebudayaan memperlihatkan bagaimana visi kepemimpinan, kondisi sosial-politik, dan komunikasi dengan para seniman saling berkaitan dalam melahirkan kebijakan yang nyata. Pendirian TIM bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan ruang pertunjukan, tetapi juga mencerminkan pandangan bahwa pembangunan kota yang baik harus mencakup aspek seni dan juga budaya.³⁸

2.3. Dukungan Seniman terhadap Pusat Kesenian Pendirian Taman Ismail Marzuki

Dukungan para seniman terhadap pendirian TIM tidak berhenti pada tahap penyampaian gagasan semata. Setelah ide tentang perlunya sebuah pusat kesenian mulai mendapat perhatian dari pemerintah daerah, kalangan seniman terus terlibat dalam pembicaraan mengenai bentuk, fungsi, dan arah pengembangannya. Mereka tidak hanya menginginkan gedung pertunjukan, tetapi sebuah ruang yang benar-benar hidup, yang bisa menjadi tempat bertemu, berdiskusi, berdebat, sekaligus bereksperimen secara artistik. Bagi mereka, pusat kesenian harus menjadi ruang bersama, bukan sekedar bangunan fisik.

Dukungan tersebut juga terlihat dari luasnya keterlibatan berbagai bidang seni. Seniman teater, sastrawan, pemusik, hingga perupa sama-sama menyuarakan kebutuhan akan ruang yang lebih layak. Situasi ini menunjukkan bahwa gagasan pendirian TIM bukanlah kepentingan satu kelompok tertentu, melainkan kebutuhan bersama komunitas seni Jakarta. Kehidupan seni pada masa itu memang cukup aktif, tetapi berjalan terpencar dan sering kali menghadapi kendala fasilitas. Pertunjukan kerap dilaksanakan di tempat seadanya, dengan perlengkapan terbatas, dan belum memiliki pusat kegiatan yang terorganisasi dengan baik.³⁹

³⁸ Ajip Rosidi. (2010). *Mengenang Hidup Orang Lain*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Hlm. 210

³⁹ Arturo Gunapriatna. & Citra Smara Dewi. (2021). *Representasi Budaya Urban dalam Pendidikan Seni Kajian: LPKJ Era 1970-an di Jakarta*. Jurnal Seni Nasional Cikini, volume 7, nomor 1. Hlm.

Kondisi tersebut mendorong munculnya solidaritas di antara para seniman. Mereka menyadari bahwa tanpa ruang yang tetap dan terkelola dengan baik, perkembangan seni di Jakarta akan sulit mencapai tahap yang lebih maju. Karena itu, dorongan untuk mendirikan pusat kesenian lahir dari pengalaman nyata yang mereka rasakan sendiri. Dalam banyak kesempatan, pertemuan informal dan diskusi panjang menjadi wadah untuk menyatukan pandangan serta merumuskan langkah yang perlu ditempuh.⁴⁰

Peran media massa pada masa itu juga cukup penting dalam memperkuat dukungan tersebut. Tulisan-tulisan opini dan laporan kebudayaan di surat kabar membantu membentuk kesadaran publik tentang pentingnya pusat kesenian bagi ibu kota. Melalui pemberitaan dan diskusi yang berkembang, wacana tentang perlunya pusat kesenian semakin meluas dan tidak lagi terbatas pada lingkaran seniman saja.⁴¹

Di sisi lain, hubungan antara seniman dan pemerintah daerah waktu itu terjalin lewat obrolan dan diskusi yang cukup terbuka. Gagasan tentang perlunya pusat kesenian tidak muncul begitu saja, tetapi lahir dari pertemuan-pertemuan yang rutin dilakukan para seniman dan intelektual. Kantor Harian Kami menjadi salah satu tempat penting bagi seniman, sastrawan, dan aktivis Angkatan 66 untuk membahas persoalan seni dan kebudayaan. Dari sana, diskusi sering berlanjut ke ruang-ruang yang lebih santai, seperti kediaman Salim Said di Jalan Matraman Raya, yang kerap menjadi tempat bertukar pikiran.⁴²

Dalam rangkaian pembicaraan itulah, Arifin C. Noor berperan cukup menonjol, terutama saat merumuskan gagasan pendirian pusat kesenian dalam bentuk tertulis. Konsep yang sudah disusun kemudian diteruskan kepada Ali Sadikin melalui Christiano Wibisono. Selain itu, tokoh-tokoh seperti Ajip Rosidi, Ilen Surianegara, dan Ramadhan KH juga aktif menyampaikan langsung pandangan mereka kepada gubernur mengenai pentingnya menghadirkan pusat kesenian yang

31

⁴⁰ Nunus Supardi. (2015). *Balai Budaya: Riwayatmu Dulu, Kini, dan Esok*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hlm. 9

⁴¹ David T. Hill. (1994). *The Press in New Order Indonesia*. Western Australia: University of Western Australia. Hlm. 12

⁴² Supardi. *Op, cit*. Hlm. 27

benar-benar layak. Bagi mereka, yang dibutuhkan bukan sekadar gedung pertunjukan, melainkan ruang yang bisa menjadi tempat bertukar gagasan, berdiskusi, bahkan berdebat tentang arah seni dan kebudayaan di Jakarta.⁴³

Ide-ide dari para seniman inilah yang kemudian ikut membentuk konsep awal TIM. Mereka memang merasa terbantu dengan sikap Ali Sadikin yang mau mendengar dan memberi ruang, tetapi di sisi lain para seniman juga tetap ingin mendapatkan kebebasan dalam berkarya. Pusat kesenian yang mereka bayangkan bukan tempat yang diatur terlalu ketat oleh pemerintah, melainkan ruang yang memberi keleluasaan untuk berkarya dan berekspresi.

Setelah pendirian TIM disetujui dan proses pembangunan dimulai, dukungan para seniman berlanjut dalam bentuk keterlibatan langsung dalam kegiatan-kegiatan awal. Mereka mengisi panggung-panggung pertunjukan, mengadakan pameran, diskusi, dan berbagai kegiatan kesenian lainnya. Kehadiran mereka bukan hanya sebagai pengguna fasilitas, tetapi juga sebagai penggerak suasana intelektual di dalamnya. Dengan cara itu, TIM benar-benar menjadi ruang yang hidup, bukan sekadar simbol kesenian.

Harapan para seniman terhadap TIM pada masa awal berdirinya cukup besar. Mereka membayangkan tempat tersebut sebagai pusat pertukaran gagasan, tempat generasi muda belajar dan berinteraksi dengan seniman, serta ruang yang memungkinkan lahirnya karya-karya baru. TIM diharapkan menjadi ruang yang terbuka terhadap perbedaan pandangan dan eksperimen artistik, sehingga dinamika seni di Jakarta bisa berkembang secara sehat.⁴⁴

Jika dilihat secara keseluruhan, dukungan seniman terhadap pendirian TIM menunjukkan adanya kesadaran kolektif tentang pentingnya pusat kesenian dalam kehidupan masyarakat perkotaan. TIM bukan sekadar hasil keputusan pemerintah, tetapi lahir dari proses dialog, kebutuhan nyata, dan partisipasi aktif para seniman. Di dalam proses tersebut, seniman tidak hanya berperan sebagai pelaku seni, tetapi juga sebagai aktor sosial yang ikut memengaruhi arah kebijakan kebudayaan di Jakarta.

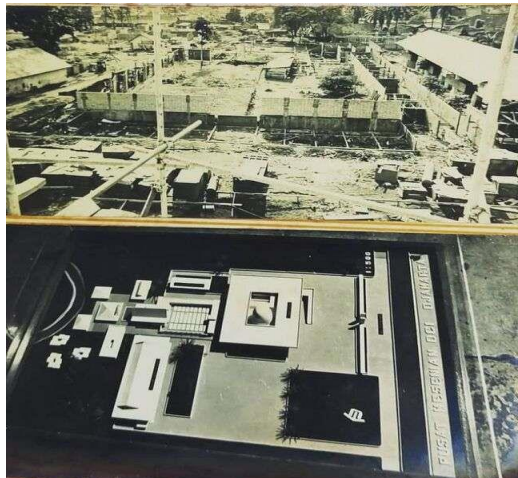
⁴³ Gunapriatna. & Dewi. *Op, cit.* Hlm. 33

⁴⁴ Supardi. *Op, cit.* Hlm. 28

Dengan demikian, pembahasan mengenai dukungan seniman terhadap pendirian TIM memperlihatkan bahwa keberadaan pusat kesenian ini merupakan hasil dari kerja sama antara seniman dan pemerintah daerah. Hal inilah yang kemudian menjadikan TIM memiliki posisi penting dalam sejarah perkembangan seni dan kebudayaan di Jakarta.

2.4 Proses Pendirian Taman Ismail Marzuki

Pendirian TIM tidak muncul begitu saja sebagai program pemerintah daerah, melainkan berawal dari inisiatif para seniman di Jakarta pada akhir periode 1960-an. Saat itu, kegiatan seni di Jakarta sebenarnya sudah cukup hidup. Para seniman teater, musik, sastra, tari, dan seni rupa sudah cukup aktif mengadakan pertunjukan di berbagai tempat seperti Planet Senen dan Balai Budaya. Akan tetapi, mereka merasa belum memiliki ruang yang layak untuk berkarya. Kegiatan seni masih berpindah-pindah tempat, fasilitas terbatas, dan belum didukung secara maksimal oleh pemerintah.⁴⁵



Gambar 2.2 Dokumentasi Awal Pembangunan TIM
Sumber: Arsip DKJ

Dalam situasi tersebut, sejumlah tokoh seniman dan budayawan mulai menyoalakan perlunya sebuah pusat kesenian yang resmi dan dikelola dengan baik. Gagasan ini kemudian disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin. Para seniman berharap pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur

⁴⁵ Nurtanti & Gloria Angelita. (2025). *Implementation of the Rebranding Stages of Taman Ismail Marzuki Becoming an Urban Theater Using the Race Model*. International Journal of Research and Scientific Innovation, volume 11. Hlm. 748.

fisik kota, tetapi juga menyediakan ruang yang mendukung perkembangan kesenian.

Ali Sadikin merespons usulan tersebut dengan cukup terbuka. Ia melihat bahwa Jakarta sebagai ibu kota negara memang membutuhkan pusat kesenian yang nyata. Bagi Ali Sadikin, pembangunan kota tidak hanya soal jalan, gedung, dan ekonomi, tetapi juga tentang kehidupan seni dan budaya masyarakatnya. Setelah melalui pembicaraan dan pertimbangan, ia menyetujui gagasan tersebut dan mulai menyiapkan langkah konkret untuk merealisasikannya.⁴⁶

Sebagai tindak lanjut, pemerintah menetapkan kawasan bekas Taman Raden Saleh di Cikini sebagai lokasi pembangunan pusat kesenian. Lokasi yang dipilih untuk pembangunan TIM adalah bekas Taman Raden Saleh di Jalan Cikini Raya nomor 73, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Kawasan ini sebelumnya merupakan kebun binatang Jakarta sebelum dipindahkan ke Ragunan, sehingga tersedia lahan luas yang strategis dan sudah dikenal masyarakat sebagai ruang publik. Pemilihan lokasi ini cukup menguntungkan karena pemerintah bisa langsung memakai lahan yang sudah ada tanpa perlu repot melakukan pembebasan tanah baru. Terlebih lagi, letaknya yang berada di pusat kota sehingga membuat tempat ini menjadi lebih mudah dijangkau, baik oleh masyarakat maupun para seniman yang ingin berkegiatan di sana.

Pembangunan TIM dimulai pada pertengahan Juni 1968 dan secara resmi disahkan melalui Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta tertanggal 19 Juli 1968. Surat keputusan ini menjadi dasar hukum pelaksanaan pembangunan sekaligus menjadi landasan administratif awal pengelolaan kawasan TIM. Pusat kesenian ini kemudian diresmikan ke publik pada 10 November 1968, bertepatan dengan Hari Pahlawan.

Nama Taman Ismail Marzuki dipilih untuk menghormati almarhum Ismail Marzuki, yaitu seorang komponis ternama asal Betawi yang dikenal lewat lagu-lagu perjuangan seperti Halo-Halo Bandung dan Rayuan Pulau Kelapa, yang banyak membangkitkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan, baik sebelum

⁴⁶ Nurtanti. *Op, cit.* Hlm. 750

maupun setelah Indonesia merdeka. Dengan penamaan ini, tujuan pendirian TIM tidak hanya sebagai fasilitas fisik tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap tokoh budaya nasional sekaligus simbol penghargaan pemerintah terhadap kontribusi seniman bagi kehidupan seni di Indonesia.⁴⁷

Pelaksanaan pembangunan dipercayakan kepada PT Pembangunan Jaya dengan arsitek Ir. Tjong. Menurut Tjong, desain TIM harus mencerminkan karakter Indonesia dan tidak sekadar meniru bentuk bangunan Barat. Konsep arsitektur TIM mendapatkan inspirasi dari bentuk tradisional Jawa dan Bali karena dianggap memiliki nilai seni dan budaya yang kuat dan sesuai dengan karakter ruang seni di Indonesia. Pada saat sebelum merancang pembangunan, Ir. Tjong bersama Ir. Boenjamin Ramto berdiskusi dengan arsitek dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan mengadakan kunjungan langsung ke Jawa Tengah dan Bali untuk menggali nilai-nilai arsitektur yang sesuai.⁴⁸ Masukan dari berbagai seniman seperti Oesman Effendi, D. Djajakusuma, Trisno Soemardjo, dan D.A. Peransi juga ikut menjadi bahan pertimbangan dalam perancangan.⁴⁹

Pembangunan tahap pertama meliputi Teater Terbuka, Teater Tertutup, Teater Arena, ruang pameran, tempat latihan, sanggar, serta *guest house* yang kini dikenal sebagai Wisma Seni. Anggaran awal yang dialokasikan oleh pemerintah daerah diperkirakan mencapai Rp 90 juta pada masa itu. Proyek pembangunan dilakukan dalam waktu relatif singkat, sekitar tiga bulan. Oleh sebab itu, ide perancangan pada gedung Teater Tertutup yang diinginkan oleh Wahyu Sihombing dan Pramana Padmodarmaya belum dapat direalisasikan. Mereka menginginkan panggung yang fleksibel, bisa digeser dan diubah dalam hitungan detik untuk kebutuhan pementasan teater. Hal ini disampaikan oleh Ir. Tjong sendiri tentang kendala waktu dan anggaran saat itu.⁵⁰

Seiring dengan berdirinya TIM, dibentuk pula Dewan Kesenian Jakarta

⁴⁷ Taracakti. *Loc, cit.*

⁴⁸ Padmodarmaya, P. (1994). *25 Tahun Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki* (cetakan pertama). Yayasan Kesenian Jakarta. Hlm. 29

⁴⁹ Ajip Rosidi. (2008). *Hidup Tanpa Ijazah yang Terekam dalam Kenangan*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya. Hlm. 222

⁵⁰ Abrar Yusra. (1994). *Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ-TIM)*. (cetakan pertama). Jakarta: Dewan Kesenian Jakarta. Hlm. 34

(DKJ) sebagai lembaga yang bertugas mengelola dan membina kegiatan seni di kawasan tersebut. DKJ berperan sebagai mediator antara pemerintah dan seniman agar kegiatan di TIM dapat berjalan teratur dan sesuai dengan aspirasi para seniman.⁵¹

⁵¹ Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta.